



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 043/KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI
CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI
TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 042 /KMA/SK/IV/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012.
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat Tahun 2012, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Pokja :
- a. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tahap Keempat bertugas melaksanakan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta menyusun naskah ujian, memeriksa dan menentukan kelulusan bagi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pokja dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap Keempat.
- KELIMA** : Segala biaya yang berhubungan dengan Pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Mahkamah Agung RI Tahun 2012.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 April 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,


Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.

Tembusan Kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012**

I. Pokja Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

A. Penyusun Naskah Ujian, Memeriksa dan Menentukan Kelulusan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Djoko Sarwoko, SH. MH.	Ketua Muda Pidana Khusus	Ketua
2.	H. Sunaryo, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Sekretaris
3.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Anggota
4.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
5.	H. Suhadi, SH. MH.	Hakim Agung	Anggota
6.	H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.	Hakim Agung	Anggota
7.	Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H	Hakim Agung	Anggota
8.	Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH.	Akademisi	Anggota
9.	Dr. Bambang Widjayanto, SH. LLM.	Praktisi Hukum	Anggota
10.	Dr. Suharto, SH. MH.	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Lukman Bahmid, SH. MH.	Tokoh Masyarakat	Anggota

Tugas :

1. Membuat/Menyusun soal-soal ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Memeriksa/mengkoreksi jawaban hasil ujian tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tes wawancara/tes lisan bagi Peserta yang telah lulus ujian tertulis.
4. Menentukan kelulusan Peserta Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Penyelenggara dan Pengawas Ujian Tertulis.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	H. Suhadi, SH. MH.	Hakim Agung	Ketua
2.	Lilik Srihartati, SH., MH.	Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Sekretaris
3.	Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.	Kepala Biro Hukum dan Humas	Anggota
4.	H. Sunaryo, SH., MH.	Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
5.	Zarof Ricar, SH. S.Sos. M.Hum.	Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana	Anggota
6.	H.RM.Anton Suyatno,SH.,M.Hum	Direktur Pembinaan Tenaga Tehnis Peradilan Umum Dirjen Badilum	Anggota
7.	H. Machmud Rahimi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
8.	Partini, SH.	Kepala Biro Kepegawaian	Anggota

Tugas A dan B :

1. Membawa soal ujian tertulis dan kelengkapannya ke Daerah (Pengadilan Tinggi yang bersangkutan).
2. Menyelenggarakan dan mengawasi ujian tertulis di Pengadilan Tinggi.
3. Membawa kembali soal ujian dan lembar jawaban untuk diserahkan pada pemeriksa ujian di Mahkamah Agung RI.

II. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.	Ketua Muda Pidana	Ketua
2.	Sumarni Marzuki, SH. MH.	Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.	Hakim Agung	Anggota
4.	Nurhadi, SH. MH.	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Anggota
5.	H. Cicut Sutiarso, SH. MH.	Dirjen Badan Peradilan Umum	Anggota
6.	Dr. H.M. Syarifuddin, SH. MH.	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Anggota
7.	Siti Nurdjanah,SH.MH.	Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan	Anggota
8.	Drs. H. Aco Nur, MH.	Kepala Badan Urusan Administrasi	Anggota
9.	I.Gusti Agung Sumanatha, SH. MH.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Peradilan	Anggota
10.	Zarof Ricar, SH. S.Sos. M.Hum.	Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana	Anggota
11.	H. Machmud Rahimi, SH. MH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Mulyadi, SH., MH.	Asisten Koordinator Kamar Pidana / Hakim Yustisial	Anggota
10.	Rudi Suparmono, SH., MH.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial	Anggota
11.	Mariana Sondang P, SH., MH.	Asisten Kamar Pidana/ Hakim Yustisial	Anggota

Tugas :

1. Menyusun Kurikulum Pendidikan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.

**PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC
PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGADILAN TINGGI
TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012**

Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Lilik Srihartati, SH. MH.	Sekretaris Badan Pengawasan	Koordinator
2.	M.E.R. Herki Artani Richmiani, SH.	Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi	Sekretaris
3.	Hanifan Hidayatulloh, SH.	Kepala Bagian Keamanan	Anggota
4.	Asep Nursoba, S.Ag.	Hakim Yustisial/Koord. Manajemen Perkara	Anggota
5.	Eko Nugroho, SH.	Koordinator Pidana Khusus Kasasi	Anggota
6.	Kosidah, SH.	Staf Panitera Muda Pidana Khusus	Anggota
7.	Hannan Tauqiefie, ST.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
8.	Ahmad Syaiful, S.Kom.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
9.	Citra Maulana, S.Kom., M.Msi.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
10.	Agus Sudarmanto, S.Kom.	Staf Biro Kepegawaian	Anggota
11.	Yuni Hayati Putri, SH	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
12.	Kartika Sandi Taurus, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota
13.	Dwi Listiani, A.Md.	Staf Biro Hukum dan Humas	Anggota

Tugas :

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pokja dalam rangka terselenggaranya Seleksi Calon Hakim Ad Hoc dan peresmian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

Dr. H.M. HATTA ALI, SH. MH.